



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU



RENCANA KERJA

TAHUN
2025



<https://bit.ly/Renja-2025-SETDAKH>

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 ini.

Rencana Kerja (Renja) adalah proses perencanaan program dan kegiatan untuk dilaksanakan pada tahun 2025 dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) periode 2021-2026 serta hasil evaluasi dari evaluator. Setiap OPD dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan yang akan dituangkan di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Perjanjian Kinerja (PK) dan selanjutnya dilakukan pengukuran atas pencapaian kinerja. Hal ini dimaksudkan agar OPD yang bersangkutan dapat melaksanakan Program dan Kegiatan sehingga sasaran lima tahun kedepan dapat tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) ini setiap OPD dapat diukur keberhasilan atau kinerjanya dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan target kinerja dan anggaran yang telah direncanakan. Hal ini juga menjadi tolak ukur keberhasilan OPD dalam melaksanakan kinerjanya sesuai tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Dalam Rencana Kerja (Renja) ini akan disajikan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) sebelumnya, analisis kinerja, review terhadap rancangan awal RKPD, usulan dari masyarakat dan Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah yang akan dicapai pada tahun bersangkutan dan target perkiraan maju pada tahun berikutnya. Kami berharap dengan adanya Rencana Kerja (Renja) ini Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan.

Kami menyadari dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) ini masih banyak kekurangan, untuk itu kami mohon masukan dan saran serta perbaikan dari atasan dan lembaga pengawasan untuk



penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 ini.

Putussibau, Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,



Drs. H. MOHD. ZAINI, M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 19650910 199303 1 011



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Tahun Lalu	6
2.1.1 Indikator Predikat SAKIP Sekretariat Daerah	11
2.1.2 Renstra 2021-2026 Sekretariat Daerah	13
2.1.3 Tidak terdapat Data Realisasi Kinerja pada Tahun 2022	14
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	21
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	22
BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	38
3.2 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah	38
3.3 Program dan Kegiatan	42
BAB IV PENUTUP	48
LAMPIRAN	50



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD	7
Tabel 2 Capaian SAKIP Sekretariat Daerah	11
Tabel 3 Matrik RATL LHE AKIP 2023	11
Tabel 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD	17
Tabel 5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	23
Tabel 6 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	41
Tabel 7 Program dan Kegiatan dan Target Capaian Kinerja Renja	42
Tabel 8 Daftar Dokumen SAKIP Sekretariat Daerah	50



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah atau biasa disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan. Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Selain itu Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Rencana Kerja (Renja) yang disusun akan menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan OPD sesuai dengan Tupoksinya. Penyusunan Renja ini nantinya akan menjadi tolak ukur dalam pengukuran Kinerja Sekretariat Daerah yang dimuat dalam Monitoring Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi



Pemerintah. Rencana Kerja (Renja) yang disusun oleh OPD memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen lainnya. Penyusunan Renja ini mengacu kepada hasil pengukuran dan evaluasi kinerja sebelumnya sehingga yang menjadi masalah pada Renja sebelumnya tidak terjadi kembali pada Renja yang akan datang.

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah menjadi bahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). RKPD yang disusun akan dijadikan Pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang selanjutnya akan disusun menjadi Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD). APBD inilah yang nantinya akan menjadi panduan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah.

Selanjutnya setelah dokumen Anggaran telah ditetapkan akan dibuat Perjanjian Kinerja yang selanjutnya akan diukur dan hasil capaian kinerja akan menjadi bahan evaluasi untuk kemudian dilakukan perbaikan terhadap permasalahan tersebut.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam pembuatan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 107 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
12. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 112/SETDA/PERKEU/2024 tentang Pembentukan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 pada dasarnya bertujuan untuk menyediakan dokumen sekaligus rujukan utama sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Sekretariat Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2024.



Penyusunan Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD) dilaksanakan secara partisipatif melalui rangkaian program Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

Disamping itu, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu juga dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya cita-cita pembangunan daerah, terutama demi terlaksananya pembangunan secara menyeluruh dan merata bagi masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu, melalui perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu, bertahap, efektif, aspiratif, partisipatif serta berkesinambungan seiring terwujudnya kerangka pembangunan daerah yang kokoh, tangguh dan mandiri sebagaimana yang diamanatkan dalam visi dan misi Kabupaten Kapuas Hulu.

Sejalan dengan fungsi dan cakupan pokok dokumen Rencana Kerja (Renja) yang pada hakekatnya merupakan komitmen Sekretariat Daerah serta memuat seluruh kebijakan dan arah kebijakan pembangunan dalam masa satu tahunan, maka secara garis besar, Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk dapat digunakan sebagai instrumen dalam mengukur efesiensi dan efektifitas kinerja.
2. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;
3. Sebagai acuan dalam menuangkan Program/Kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
4. Menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah kedalam Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah.
5. Sebagai patokan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran kinerja serta Evaluasi Kinerja.



1.4 Sistematika Penulisan

Untuk dapat menggambarkan dan menguraikan secara sistematis arah kebijakan prioritas pembangunan dan wujud masa depan yang diinginkan dan diperjuangkan, maka materi Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini akan dipaparkan tentang Latar Belakang; Landasan Hukum; Maksud Dan Tujuan; dan Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU

Pada Bab ini akan dipaparkan Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan Capaian Renstra OPD; Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD; Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD; Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

Pada Bab ini akan dipaparkan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi; Tujuan dan sasaran Renja OPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH

Pada Bab ini akan dipaparkan Rencana Kerja dan Pendanaan dalam bentuk program dan kegiatan Sekretariat Daerah.

BAB V PENUTUP

Pada Bab ini akan dipaparkan kesimpulan dari pembuatan Renja Sekretariat Daerah.



BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Evaluasi tersebut dilakukan melalui pengukuran kinerja yang dilakukan berdasarkan target kinerja pada Perjanjian Kinerja terhadap realisasi kinerja pada Lkjp Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022-2023 yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan Target Akhir Renstra, Target 2024 serta prakiraan capaian tahun 2024.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja dan kendala yang dihadapi serta solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024, seperti pada tabel berikut ini:



Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Target Akhir Renstra (2026)	Realisasi 2022	Target dan Realisasi 2023 (N-2)			2024 (n-1)		Perkiraan Realisasi 2024 (n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Satuan	Realisasi Capaian	Tingkat Capaian %	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	Predikat SAKIP Sekretariat Daerah	A	CC	BB	B	87,50	BB	Predikat	B	87,50	
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten	3,3	-	3,3	2,671	80,93	3,3	Nilai	3,3	100,00	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	81	-	80,73	83,84	103,85	80,9	Nilai	84	103,83	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebijakan strategi di bidang administrasi umum yang ditindaklanjuti	100%	-	100%	-	#VALUE!	100	%	100	100,00	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, dokumen Penganggaran dan Laporan Kinerja yang sesuai dengan pedoman teknis	100%	-	100%	-	#VALUE!	100	%	100	100,00	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	95%	-	100%	-	#VALUE!	100	%	100	100,00	
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	97,5 %	-	95 %	-	#VALUE!	95	%	95	100,00	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	100 %	-	87 %	-	#VALUE!	90	%	90	100,00	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum yang terpenuhi	100 %	-	100 %	-	#VALUE!	100	%	100	100,00	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terakomodir	100 %	-	100 %	-	#VALUE!	100	%	100	100,00	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	100 %	-	100 %	-	#VALUE!	100	%	100	100,00	



Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025
Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 %	-	100 %	-	#VALU E!	100	%	100	100,00	
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Keuangan dan Kesejahteraan Kepala Daerah	100 %	-	100 %	-	#VALU E!	100	%	100	100,00	
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Perangkat Daerah dengan Tingkat Kematangan Tinggi melalui Penilaian Mandiri	-	-		-	#VALU E!	15	OPD	15	100,00	
		Jumlah Analisis Jabatan Perangkat Daerah yang tepat fungsi	-	-		-	#VALU E!	6	Anjab	6	100,00	
		Jumlah Perangkat Daerah yang telah menetapkan Standar Pelayanan Publik	-	-		-	#VALU E!	7	OPD	7	100,00	
		Jumlah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Reformasi Birokrasi	-	-		-	#VALU E!	6	OPD	6	100,00	
		Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai AKIPnya B sesuai Hasil Evaluasi Tim APIP dari Perangkat Daerah yang dievaluasi	-	-		-	#VALU E!	18	OPD	18	100,00	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah layanan Fasilitasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	250	-	175	-	#VALU E!	200	Lyn	200	100,00	
		Jumlah layanan komunikasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	270	-	210	-	#VALU E!	230	Lyn	230	100,00	
		Jumlah layanan dokumentasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	250	-	200	-	#VALU E!	200	Lyn	200	100,00	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan strategis dibidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100%	-	100%	-	#VALU E!	100	%	100	100,00	
4.01.02.2.01	Administrasi Pemerintahan Tata	Persentase penyelesaian administrasi batas wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Desa	100%	-	56%	-	#VALU E!	77	%	77	100,00	
		Persentase Pemuntakhiran Data Rupabumi Kecamatan	100%	-	50%	-	#VALU E!	74	%	74	100,00	
		Persentase Jumlah OPD yang Menyusun LPPD sesuai petunjuk	95%	-	85%	-	#VALU E!	90	%	90	100,00	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase rumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan masyarakat, dan	100%	-	100%	-	#VALU E!	100	%	100	100,00	



<https://bit.ly/Renja-2025-SETDAKH>
Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025
Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

		kesejahteraan Sosial yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan										
		Persentase Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan terkait Kesejahteraan Sosial yang terlaksana	100%	-	100%	-	#VALUE!	100	%	100	100,00	
		Persentase Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang terlaksana	100%	-	100%	-	#VALUE!	100	%	100	100,00	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase kebijakan yang harmonis	-	-	-	-	#VALUE!	70	%	70	100,00	
		Persentase penyelesaian Proses penyusunan produk hukum	-	-	-	-	#VALUE!	90	%	90	100,00	
		Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum	-	-	-	-	#VALUE!	90	%	90	100,00	
		Persentase Publikasi dan penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	#VALUE!	90	%	90	100,00	
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Wajib Daerah	26%	-	17%	-	#VALUE!	21	%	21	100,00	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan strategi dibidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	100%	-	100%	-	#VALUE!	100	%	100	100,00	
				-		-						
				-		-						
		Persentase kebijakan Pembangunan yang ditindaklanjuti	100%	-	100%	-	#VALUE!	100	%	100	100,00	
		Persentase pemanfaatan kebijakan sumber daya alam yang tepat guna	100%	-	100%	-	#VALUE!	100	%	100	100,00	
		Persentase kebijakan daerah di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang di tindaklanjuti	100%	-	100%	-	#VALUE!	100	%	100	100,00	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian yang di tindaklanjuti	100%	-	100%	-	#VALUE!	100	%	100	100,00	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase rekomendasi kebijakan Administrasi Pembangunan yang di tindaklanjuti	100%	-	100%	-	#VALUE!	100	%	100	100,00	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase capaian efisiensi dan efektifitas pada pengadaan barang dan jasa dengan metode pemilihan tender/seleksi dan e-purchasing	-	-	-	-	#VALUE!	80	%	80	100,00	
		Jumlah Penerima Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik	-	-	-	-	#VALUE!	50	OPD	50	100,00	
		Jumlah pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah,	-	-	-	-	#VALUE!	20	Plk Ush	20	100,00	



		terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personil Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)										
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase rekomendasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang di tindaklanjuti	-	-	-	-	#VALUE!	100	%	100	100,00	

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Sekretaris Daerah Tahun 2024 pada tabel diatas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :



2.1.1. Indikator Predikat SAKIP Sekretariat Daerah

Berdasarkan hasil Evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu bahwa SAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2022 mendapat predikat CC dan secara bertahap semakin meningkat pada Tahun 2023 telah mencapai predikat B dengan Nilai 59,8. Pada Tahun 2023 ditargetkan dengan Nilai BB dan terealisasi dengan Nilai B dengan capaian sebesar 87,50%. Adapun rincian penilaian seperti pada tabel:

Tabel 2 Capaian SAKIP Sekretariat Daerah

No	Aspek	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	18,0
2	Pengukuran Kinerja	30	16,2
3	Pelaporan Kinerja	15	10,1
4	Evaluasi Kauntabilitas Kinerja	25	15,5
TOTAL		100%	59,8

Sumber: <https://bit.ly/LHE-AKIP-2023>

Perolehan nilai tersebut termasuk dalam kategori predikat B yang artinya telah terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.

Rekomendasi dan Rencana Aksi Tindaklanjuti:

Tabel 3 Matrik RATL LHE AKIP 2023

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut
1	2	3
1	Melengkapi dokumen perencanaan dengan dokumen rencana aksi yang menjabarkan Renja dan Perjanjian Kinerja menjadi serangkaian tahapan tindakan yang perlu dilakukan untuk mencapai target kinerja	Membuat Renaksi Kinerja
2	Mempublikasikan dokumen renja sebelum akhir triwulan I tahun berkenaan	



3	Memastikan kembali agar setiap pejabat yang menandatangani Perjanjian Kinerja menyusun SKP yang selaras dengan Perjanjian Kinerjanya dan setiap pegawai menyusun SKP yang selaras dengan SKP atasannya.	Memastikan setiap SKP agar selaras dengan Perjanjian Kinerja
4	Memastikan kembali agar setiap indikator kinerja individu (IKI) yang digunakan dilengkapi dengan definisi operasional dan mekanisme pengumpulan data (penentuan sumber data kinerja) yang jelas	Pembuatan dokumen IKI akan mencantumkan sumber data berupa bukti dukung yang jelas
5	Menyelenggarakan pengukuran kinerja setiap triwulan secara rutin dengan menggunakan data kinerja yang relevan	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengukuran kinerja setiap 3 bulan berdasarkan Perjanjian Kinerja dengan mengumpulkan data kinerja langsung ke setiap bagian-bagian - Melakukan rapat evaluasi berdasarkan pencapaian pada pengukuran kinerja
6	Memperbaiki penyajian laporan kinerja perangkat daerah periode selanjutnya dengan menyertakan informasi tentang namun tidak terbatas pada :	Laporan Kinerja akan memuat:
	- aksi-aksi konkret yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala yang ditemui berikut hasilnya:	Analisis Strategi dalam menangani permasalahan serta strategi perbaikan dalam mengatasi kendala
	- memberikan penjelasan/ penafsiran/interpretasi atas nilai efisiensi yang diperoleh	<ul style="list-style-type: none"> - memberikan informasi atas upaya perbaikan masalah yang terdapat pada LAKIP sebelumnya - akan membahas perolehan terkait perolehan nilai efisiensi
7	Melaksanakan penilaian mandiri akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Membuat form penilaian mandiri AKIP
8	Menyusun rencana aksi tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi serta melaksanakan rencana tersebut	RATL ini

Sumber: <https://bit.ly/RATL-AKIP-INKAB>



2.1.2 Renstra 2021-2026 Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah telah memiliki [Renstra](#) periode 2021-2026 yang telah ditetapkan pada Bulan Januari 2023 dan telah mengalami revisi sebanyak 1 kali. Sepanjang tahun 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tidak pernah melakukan pengukuran kinerja sampai level individu, pengukuran hanya pada sampai level eselon II atau pimpinan level OPD. Namun pada pertengahan Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan Pengukuran Kinerja sampai kepada level Staf.

Dalam proses pengukuran kinerja, terdapat perubahan terhadap beberapa indikator, sasaran dan target kinerja yang mengharuskan melakukan Revisi terhadap Renstra tersebut.

Beberapa permasalahan yang terdapat pada dokumen Renstra tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tidak sesuai IKU pada level dibawahnya. Sasaran setiap indikator merupakan penunjang untuk mewujudkan indikator pada level diatasnya. Sasaran level bawah merupakan sebuah rumusan untuk mewujudkan sasaran level diatasnya. Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu terdapat 3 Program yang merupakan tanggung jawab dari ke-3 Asisten yaitu Asisten Administrasi Umum, Asisten Pemerintahan dan Kesra dan Asisten Perekonomian Pembangunan.
2. Terdapat indikator yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi atau sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini seperti pada Bagian Organisasi, Bagian Hukum dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang tidak tepat sasaran sehingga perlu melakukan perubahan indikator seperti pada tabel diatas.
3. Terdapat target kinerja yang tidak sesuai. Kesalahan paling banyak terdapat target yang sangat rendah sehingga pada saat pengukuran terjadi lonjakan capaian yang sangat luar biasa diatas 130%. Capaian yang ideal adalah antara 90% s/d 130%. Apabila capaian tidak pada interval tersebut dapat dikatakan bahwa perencanaan yang telah ditetapkan tidak sangat matang sehingga perlu



dilakukan revisi kembali terhadap target. Salah satu indikator yang targetnya telah melebihi seperti: Kerjasama wajib daerah capaian 317%, Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi capaian 380%, Pendampingan Kelembagaan 400%, pendampingan ketatalaksanaan 1000%, dan pendampingan SAKIP 860%.

2.1.3. Tidak Terdapat Data Realisasi Kinerja Pada Tahun 2022

Pada Tahun 2022 sampai dengan 2023 tidak terdapat data realisasi kinerja seperti terlihat pada tabel diatas. Pada Tahun 2022 realisasi yang ada hanya pada satu indikator saja yaitu Predikat SAKIP Sekretariat Daerah mendapat Nilai D dengan target BB sehingga capaian hanya mencapai 31,9% saja.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 belum dievaluasi, sehingga Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022 belum diketahui. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kapuas Hulu terakhir di reviu oleh Kementrian Dalam Negeri pada tahun 2018 dengan nilai 2,886. Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2018 masih digunakan sebagai nilai terakhir LPPD) Kabupaten Kapuas Hulu karena LPPD tahun 2019 sampai dengan saat ini belum mendapatkan reviu. Namun, meski belum memperoleh reviu tidak menjadikan Kabupaten Kapuas Hulu berhenti melakukan perbaikan kualitas dan efisiensi kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu.

Pada Tahun 2022 dan 2023 tidak melakukan pengukuran IKI atas kinerja yang telah diperjanjikan. Pengukuran kinerja didasarkan atas serapan anggaran sehingga tidak memiliki sumber data atau data dukung yang diharapkan oleh evaluator. Pengukuran Kinerja seharusnya dilakukan dengan mengumpulkan data kinerja sebagaimana yang telah dijabarkan dalam IKI sehingga nilai yang ada



pada dokumen pengukuran berdasarkan bukti dukung dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahan datanya.

Berdasarkan dari permasalahan diatas seperti rendahnya Nilai SAKIP, Renstra yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini dan tidak adanya pengukuran kinerja maka diuraikan secara umum penyebab dan solusinya:

1. Rendahnya kemampuan SDM dalam menyusun SAKIP. SDM yang menyusun SAKIP belum berpengalaman serta belum pernah mengikuti Diklat dan Bimtek mengenai Perencanaan. Saran mengenai permasalahan ini agar mempersiapkan anggaran untuk Diklat dan Bimtek.
2. Minimnya jumlah SDM yang menyusun Dokumen SAKIP. Pada Tahun 2021 SDM yang menangani Perencanaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu hanya terdiri dari 2 (dua) orang. Minimnya SDM dalam perencanaan dengan kompleksitas pekerjaan sehingga pekerjaan menjadi tidak efektif dan efisien dan menyebabkan nilai SAKIP rendah. Saran mengenai permasalahan ini yaitu pada tahun 2023 menambah SDM 1 (satu) orang dan pada tahun 2024 menambah 2 (dua) orang Perencana sehingga pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien.
3. Tingginya mobilitas dan tanggung jawab yang luas cakupannya pada Sekretariat Daerah. Sekretariat Daerah memiliki 3 Asisten dan 9 Bagian yang berarti begitu besar dan kompleksnya tugas dan pekerjaan pada Sekretariat Daerah. Dapat dikatakan bahwa dalam 1 bagian hampir setara dengan 1 OPD dan beberapa Bagian merupakan pembina pada setiap OPD.
4. Terkait rendahnya nilai SAKIP maka akan dilakukan peningkatan nilai dengan cara melakukan penilaian mandiri terhadap AKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 tentang Kebijakan Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun hasil penilaian



<https://bit.ly/Renja-2025-SETDAKH>

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025
Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

mandiri tersebut dapat dilihat pada link: <https://bit.ly/Penilaian-Mandiri-AKIP-Setda-KH>



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Tabel 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

Kode	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (N-2) 2022	Tahun (N-1) 2023	Tahun N (2024)	Tahun (N+1) 2025	Tahun N-2 (2022)	Tahun N-1 (2023)	Tahun N (2024)	Tahun N+1 (2025)	
4.01	Predikat SAKIP Sekretariat Daerah	Nihil	Nihil	BB	BB	BB	A	CC	B	B	BB	
	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten	Nihil	Nihil	3,5	3,6	3,7	3,8	0	2,67	3,3	3,4	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	Nihil	Nihil	80,73	80,80	80,90	81,00	0	83,8	80,9	81	
4.01.01	Persentase kebijakan strategi di bidang administrasi umum yang ditindaklanjuti	Nihil	Nihil	100	100	100	100	0	-	100	100	
4.01.01.2.01	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, dokumen Penganggaran dan Laporan Kinerja yang sesuai dengan pedoman teknis	Nihil	Nihil	100	100	100	100	0	-	100	100	
4.01.01.2.02	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Nihil	Nihil	95	100	100	100	0	-	100	100	
4.01.01.2.03	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	Nihil	Nihil	95	95	95	97,5	0	-	95	95	
4.01.01.2.05	Persentase Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	Nihil	Nihil	87	90	95	100	0	-	90	90	
4.01.01.2.06	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum yang terpenuhi	Nihil	Nihil	100	100	100	100	0	-	100	100	



<https://bit.ly/Renja-2025-SETDAKH>
Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025
Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

4.01.01.2.07	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terakomodir	Nihil	Nihil	100	100	100	100	0	-	100	100	
4.01.01.2.08	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Nihil	Nihil	100	100	100	100	0	-	100	100	
4.01.01.2.09	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Nihil	Nihil	100	100	100	100	0	-	100	100	
4.01.01.2.11	Persentase Pelayanan Keuangan dan Kesejahteraan Kepala Daerah	Nihil	Nihil	100	100	100	100	0	-	100	100	
4.01.01.2.13	Jumlah Perangkat Daerah dengan Tingkat Kematangan Tinggi melalui Penilaian Mandiri	Nihil	Nihil	5	6	7	8	0	-	15	15	
	Jumlah Analisis Jabatan Perangkat Daerah yang tepat fungsi	Nihil	Nihil	0	0	0	0	0	-	6	6	
	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menetapkan Standar Pelayanan Publik	Nihil	Nihil	0	0	0	0	0	-	7	7	
	Jumlah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Reformasi Birokrasi	Nihil	Nihil	0	0	0	0	0	-	6	6	
	Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai AKIPnya B sesuai Hasil Evaluasi Tim APIP dari Perangkat Daerah yang dievaluasi	Nihil	Nihil	0	0	0	0	0	-	18	18	
4.01.01.2.14	Jumlah layanan Fasilitasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	Nihil	Nihil	175	200	225	250	0	-	200	200	
	Jumlah layanan komunikasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	Nihil	Nihil	210	230	250	270	0	-	230	230	
	Jumlah layanan dokumentasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	Nihil	Nihil	200	200	225	250	0	-	200	200	
4.01.02	Persentase kebijakan strategis dibidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	Nihil	Nihil	100	100	100	100	0	-	100	100	
4.01.02.2.01	Persentase penyelesaian administrasi batas wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Desa	Nihil	Nihil	66	77	88	100	0	-	77	77	
	Persentase Pemuntakhiran Data Rupabumi Kecamatan	Nihil	Nihil	50	74	87	100	0	-	74	74	
	Persentase Jumlah OPD yang Menyusun LPPD sesuai petunjuk	Nihil	Nihil	85	90	92,5	95	0	-	90	90	
4.01.02.2.02	Persentase rumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual,	Nihil	Nihil	100	100	100	100	0	-	100	100	



<https://bit.ly/Renja-2025-SETDAKH>
Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025
Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

	kesejahteraan masyarakat, dan kesejahteraan Sosial yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan											
	Persentase Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan terkait Kesejahteraan Sosial yang terlaksana	Nihil	Nihil	0	0	0	0	0	-	100	100	
	Persentase Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang terlaksana	Nihil	Nihil	0	0	0	0	0	-	100	100	
4.01.02.2.03	Persentase kebijakan yang harmonis	Nihil	Nihil	0	0	0	0	0	-	70	70	
	Persentase penyelesaian Proses penyusunan produk hukum	Nihil	Nihil	0	0	0	0	0	-	90	90	
	Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum	Nihil	Nihil	0	0	0	0	0	-	90	90	
	Persentase Publikasi dan penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan	Nihil	Nihil	0	0	0	0	0	-	90	90	
4.01.02.2.04	Persentase Kerjasama Wajib Daerah	Nihil	Nihil	17	21	21	26	0	-	21	21	
4.01.03	Persentase kebijakan strategi dibidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	Nihil	Nihil	100	100	100	100	0	-	100	100	
	Persentase kebijakan Pembangunan yang ditindaklanjuti	Nihil	Nihil	0	0	0	0	0	-	100	100	
	Persentase pemanfaatan kebijakan sumber daya alam yang tepat guna	Nihil	Nihil	0	0	0	0	0	-	100	100	
	Persentase kebijakan daerah di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang di tindaklanjuti	Nihil	Nihil	0	0	0	0	0	-	100	100	
4.01.03.2.01	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian yang di tindaklanjuti	Nihil	Nihil	0	0	0	0	0	-	100	100	
4.01.03.2.02	Persentase rekomendasi kebijakan Administrasi Pembangunan yang di tindaklanjuti	Nihil	Nihil	0	0	0	0	0	-	100	100	
4.01.03.2.03	Persentase capaian efisiensi dan efektifitas pada pengadaan barang dan jasa dengan metode pemilihan tender/seleksi dan e-purchasing	Nihil	Nihil	0	0	0	0	0	-	80	80	
	Jumlah Penerima Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik	Nihil	Nihil	0	0	0	0	0	-	50	50	
	Jumlah pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah,	Nihil	Nihil	0	0	0	0	0	-	20	20	



	terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personil Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)											
4.01.03.2.04	Persentase rekomendasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang di tindaklanjuti	Nihil	Nihil	0	0	0	0	0	-	100	100	

Berdasarkan tabel diatas ditandai dengan warna kuning telah dijelaskan dan diuraikan sebelumnya pada halaman **11**.



2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membantu tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan umum dengan fungsi koordinasi, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas pimpinan dan wakil pimpinan.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Daerah secara teknis membantu kelancaran tugas pimpinan dan wakil pimpinan secara administrasi bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada pimpinan dan wakil pimpinan, tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dituntut semakin cepat, tepat serta mampu meletakkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa isu strategis diprediksi akan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Isu strategis tersebut akan digunakan untuk mengantisipasi berbagai masalah yang dihadapi dan untuk memberikan arah bagi perumusan berbagai program kegiatan Sekretariat Daerah pada tahun-tahun mendatang. Adapun Isu strategis yang di hadapi:

1. Impelementasi reformasi birokrasi yang belum maksimal.
2. Kurangnya pemahaman para pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang tugas penyusunan kebijakan dan koordinator perangkat daerah;
3. Kualitas pelayanan administrasi umum, keuangan Sekretariat Daerah, kerumahtanggaan dan penatausahaan masih perlu ditingkatkan.



2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Setiap program dan kegiatan yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sudah dibuat dalam bentuk rancangan awal yang tertuang di dalam RANWAL RENJA. Rancangan awal ini telah disusun pada awal bulan Januari 2024 yang terdapat pada SIPD dan akan menjadi patokan dalam menyusun Renja 2025 serta untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan RKA dan selanjutnya akan disahkan menjadi DPA yang selanjutnya akan dibuat Perjanjian Kinerja atasnya Rencana Aksi Kinerja, Pengukuran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Tahunan.

Dalam Renja tahun 2024 ini akan dilakukan review terhadap rancangan awal RKPD yang telah ditetapkan untuk menilai apakah Renja awal yang disusun sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mencegah adanya program atau kegiatan yang tidak diakomodir. Reviu didasarkan atas pengukuran dan evaluasi kinerja pada Tahun berjalan serta LHE AKIP oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu. Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator	Target	Pagu Indikatif
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			22.483.758.061	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			68.212.609.698
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	Predikat SAKIP Sekretariat Daerah		22.483.758.061	SEKRETARIAT DAERAH	Predikat SAKIP Sekretariat Daerah	BB	68.212.609.698
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten				Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten	3,3	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	80,9	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebijakan strategi di bidang administrasi umum yang ditindaklanjuti		16.905.300.361	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebijakan strategi di bidang administrasi umum yang ditindaklanjuti	100	47.239.010.076
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, dokumen Penganggaran dan Laporan Kinerja yang sesuai dengan pedoman teknis		701.497.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, dokumen Penganggaran dan Laporan Kinerja yang sesuai dengan pedoman teknis	100	701.249.000
4.01.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	400.426.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	474.692.000
4.01.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1	38.664.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1	38.514.000
4.01.01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1	31.717.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan	1	31.717.000



<https://bit.ly/Renja-2025-SETDAKH>
Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025
Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

						Dokumen Perubahan RKA SKPD		
4.01.01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1	30.032.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1	30.032.000
4.01.01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1	17.444.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1	17.444.000
4.01.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5	153.739.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5	90.850.000
4.01.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	4	29.475.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	4	18.000.000
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan		12.235.815.111	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100	16.972.139.981
4.01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	107	10.869.038.711,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12	16.241.154.981
4.01.01.2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1	293.354.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1	263.430.000
4.01.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1	801.800.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1	194.520.000
4.01.01.2.02.004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	30.233.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	17.600.000
4.01.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	43.785.400,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	42.705.000



<https://bit.ly/Renja-2025-SETDAKH>
Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025
Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

4.01.01.2.02.006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan tindaklanjut pemeriksaan	1	159.924.000,00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan tindaklanjut pemeriksaan	1	197.985.000
4.01.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	30.662.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	7.600.000
4.01.01.2.02.008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	7.018.000,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	7.145.000
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik		409.807.250	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	95	521.811.000
4.01.01.2.03.001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	32.660.000,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	32.910.000
4.01.01.2.03.002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	40.841.000,00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	39.315.000
4.01.01.2.03.003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	51.804.000,00	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	61.516.300
4.01.01.2.03.005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	36.525.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	36.981.000
4.01.01.2.03.006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	247.977.250,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	351.088.700
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu		3.558.181.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	90	744.652.000
4.01.01.2.05.001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	103.500.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	36	120.400.000



<https://bit.ly/Renja-2025-SETDAKH>
Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025
Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

4.01.01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	232.680.000
4.01.01.2.05.003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	1	3.161.250.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	120	108.460.000
4.01.01.2.05.004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Siste	1	30.788.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Siste	117	100.832.000
4.01.01.2.05.005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kine	1	15.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kine	117	17.150.000
4.01.01.2.05.006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	3	18.000.000				
4.01.01.2.05.008	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	3	19.900.000				
4.01.01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30	209.743.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40	165.130.000
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum yang terpenuhi		0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum yang terpenuhi	100	9.716.656.250
4.01.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	88.212.000
4.01.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	1	39.750.000
4.01.01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	386.953.000
4.01.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	199.681.000
4.01.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	179.279.500
4.01.01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30	2.117.944.000



<https://bit.ly/Renja-2025-SETDAKH>
Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025
Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

4.01.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	1500	6.533.146.750
4.01.01.2.06.010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	171.690.000
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terakomodir		0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terakomodir	100	3.887.532.000
4.01.01.2.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	3.851.832.000
4.01.01.2.07.005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang tersedia			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang tersedia	650	35.700.000
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia		0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100	3.826.502.000
4.01.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5053	61.000.000
4.01.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	2.161.000.000
4.01.01.2.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	925.565.000
4.01.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	678.937.000
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara		0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100	1.728.940.345
4.01.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	34	566.789.345



<https://bit.ly/Renja-2025-SETDAKH>
Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025
Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
4.01.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11	686.901.000
4.01.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	475.250.000
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Keuangan dan Kesejahteraan Kepala Daerah		0	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Keuangan dan Kesejahteraan Kepala Daerah	100	726.831.000
4.01.01.2.11.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12	207.831.000
4.01.01.2.11.003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	7	119.000.000
4.01.01.2.11.004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	400.000.000
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Perangkat Daerah dengan Tingkat Kematangan Tinggi melalui Penilaian Mandiri		0	Penataan Organisasi	Jumlah Perangkat Daerah dengan Tingkat Kematangan Tinggi melalui Penilaian Mandiri	15	750.027.000
		Jumlah Analisis Jabatan Perangkat Daerah yang tepat fungsi				Jumlah Analisis Jabatan Perangkat Daerah yang tepat fungsi	6	
		Jumlah Perangkat Daerah yang telah menetapkan Standar Pelayanan Publik				Jumlah Perangkat Daerah yang telah menetapkan Standar Pelayanan Publik	7	
		Jumlah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Reformasi Birokrasi				Jumlah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Reformasi Birokrasi	6	



<https://bit.ly/Renja-2025-SETDAKH>
 Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025
 Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

		Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai AKIPnya B sesuai Hasil Evaluasi Tim APIP dari Perangkat Daerah yang dievaluasi				Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai AKIPnya B sesuai Hasil Evaluasi Tim APIP dari Perangkat Daerah yang dievaluasi	18	
4.01.01.2.13.001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah PD yang dilakukan pendampingan pengelolaan kelembagaan	22	236.085.000
						Jumlah PD yang dilakukan pendampingan anjab	5	
4.01.01.2.13.002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah PD yang dilakukan Pendampingan Ketatalaksanaan	50	238.442.000
						Jumlah Unit Pelayanan Publik yang dilakukan Pendampingan	7	
4.01.01.2.13.003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah PD yang dilakukan pendampingan SAKIP	50	275.500.000
						umlah PD yang terlibat dalam Pelaksanaan RB sebagai Leading Sector	6	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah layanan Fasilitasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah		0	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah layanan Fasilitasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	200	7.662.669.500
		Jumlah layanan komunikasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah				Jumlah layanan komunikasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	230	
		Jumlah layanan dokumentasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah				Jumlah layanan dokumentasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	200	
4.01.01.2.14.001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan			Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1	3.680.730.000
4.01.01.2.14.002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1	961.350.500



<https://bit.ly/Renja-2025-SETDAKH>
 Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025
 Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

4.01.01.2.14.003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan			Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1	3.020.589.000
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan strategis dibidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti		3.000.163.250	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan strategis dibidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100	18.465.299.822
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase penyelesaian administrasi batas wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Desa	60	662.921.650	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase penyelesaian administrasi batas wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Desa	77	642.441.500
		Persentase Pemuntakhiran Data Rupabumi Kecamatan	66			Persentase Pemuntakhiran Data Rupabumi Kecamatan	74	
		Persentase Jumlah OPD yang Menyusun LPPD sesuai petunjuk	82			Persentase Jumlah OPD yang Menyusun LPPD sesuai petunjuk	90	
4.01.02.2.01.001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintah	1	280.127.150	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintah	2	180.742.500
4.01.02.2.01.002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1	143.574.000	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1	138.997.000
4.01.02.2.01.003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1	239.220.500	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1	322.702.000
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase rumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan masyarakat, dan kesejahteraan Sosial yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	100	1.339.799.500	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase rumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan masyarakat, dan kesejahteraan Sosial yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	100	17.065.024.222
		Persentase Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan terkait Kesejahteraan Sosial yang terlaksana				Persentase Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan terkait Kesejahteraan Sosial yang terlaksana	100	
		Persentase Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang terlaksana				Persentase Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang terlaksana	100	



<https://bit.ly/Renja-2025-SETDAKH>
Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025
Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

4.01.02.2.02.001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	410.857.500	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	16.288.290.422
4.01.02.2.02.002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1	585.700.000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	KODE AKUN KEGIATAN SALAH !	487.206.800
4.01.02.2.02.003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, TrantibumLinmas	1	343.242.000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, TrantibumLinmas	544	289.527.000
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase kebijakan yang harmonis	75	824.106.100	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase kebijakan yang harmonis	70	624.106.100
		Persentase penyelesaian Proses penyusunan produk hukum	95			Persentase penyelesaian Proses penyusunan produk hukum	90	
		Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum	95			Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum	90	
		Persentase Publikasi dan penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan	95			Persentase Publikasi dan penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan	90	
4.01.02.2.03.001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	1	445.703.700	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	800	342.821.000
4.01.02.2.03.002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	10	229.428.800	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	10	150.210.000



<https://bit.ly/Renja-2025-SETDAKH>
Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025
Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

4.01.02.2.03.003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	120	148.973.600	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	19	131.075.100
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Wajib Daerah		173.336.000	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Wajib Daerah	21	133.728.000
4.01.02.2.04.001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	17	173.336.000	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	5	133.728.000
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan strategi dibidang Perekonomian yang ditindaklanjuti		2.578.294.450	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan strategi dibidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	100	2.508.299.800
		Persentase kebijakan Pembangunan yang ditindaklanjuti				Persentase kebijakan Pembangunan yang ditindaklanjuti	100	
		Persentase pemanfaatan kebijakan sumber daya alam yang tepat guna				Persentase pemanfaatan kebijakan sumber daya alam yang tepat guna	100	
		Persentase kebijakan daerah di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang di tindaklanjuti				Persentase kebijakan daerah di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang di tindaklanjuti	100	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian yang di tindaklanjuti	80	518.200.000	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian yang di tindaklanjuti	100	346.885.300
4.01.03.2.01.001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1	226.200.000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4	112.955.000
4.01.03.2.01.002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	3	73.000.000	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4	77.537.000
4.01.03.2.01.003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan	1	73.000.000	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan	1	52.131.000
4.01.03.2.01.004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1	73.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1	52.131.300



<https://bit.ly/Renja-2025-SETDAKH>
Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025
Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

4.01.03.2.01.005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1	73.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	2	52.131.000
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase rekomendasi kebijakan Administrasi Pembangunan yang di tindaklanjuti	100	226.200.000	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase rekomendasi kebijakan Administrasi Pembangunan yang di tindaklanjuti	100	196.292.200
4.01.03.2.02.001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1	70.070.000	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4	41.676.500
4.01.03.2.02.002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1	58.052.000	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4	47.081.700
4.01.03.2.02.003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan	1	98.078.000	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan	100	107.534.000
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase capaian efisiensi dan efektifitas pada pengadaan barang dan jasa dengan metode pemilihan tender/seleksi dan e-purchasing	100	1.619.982.350	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase capaian efisiensi dan efektifitas pada pengadaan barang dan jasa dengan metode pemilihan tender/seleksi dan e-purchasing	80	1.812.996.000
		Jumlah Penerima Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik	5000			Jumlah Penerima Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik	50	
		Jumlah pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personil Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	80			Jumlah pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personil Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	20	
4.01.03.2.03.001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1	1.158.035.950	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	KODE AKUN KEGIATAN SALAH !	1.208.268.800



Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025
Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

4.01.03.2.03.002	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1	331.782.400	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	78	377.389.100
4.01.03.2.03.003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	10	130.164.000	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	60	227.338.100
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase rekomendasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang di tindaklanjuti	100	213.912.100	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase rekomendasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang di tindaklanjuti	100	152.126.300
4.01.03.2.04.001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	5	125.449.300	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4	52.131.300
4.01.03.2.04.002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	2	37.289.300	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	2	52.131.000
4.01.03.2.04.003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	2	51.173.500	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	2	47.864.000

Keterangan Warna:



Menjadi Bahan Evaluasi atau mengalami perbaikan



Berdasarkan dari tabel tersebut diatas maka diuraikan sebagai berikut :

1. Terdapat beberapa target yang kosong pada tabel Rancangan Awal, hal ini terjadi karena penginputan pada sistem di SIPD tidak terinput atau terkontrol dengan baik sehingga setelah ditetapkan oleh tim TAPD terdapat data yang belum lengkap. Keterlambatan penginputan menjadi kendala kekosongan data dikarenakan Bappeda menginformasikan dengan batas waktu yang sangat singkat, sehingga Sekretariat Daerah baru mencapai tahap pengumpulan data pada setiap Bagian sehingga ketika melakukan input tidak lengkap. Rencana perbaikan: akan dilakukan kontrol dan pengumpulan data akan dilakukan sebelum jadwal penginputan.
2. Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah semula ditergetkan 2 dokumen saja yaitu Renstra dan Renja saja. Namun berdasarkan dari [hasil evaluasi](#) oleh Inspektorat pada Tahun 2024 pada Halaman 8 pada point a menyebutkan bahwa dokumen Perencanaan terdiri dari 4 yaitu Rensta, Renja, PK dan Rencana Aksi.
3. Penyediaan jasa surat menyurat pada tahun 2024 di rencanakan membeli materai sebanyak 3.900 lembar. Namun sampai dengan Triwulan III telah melebihi target penggunaan materai sebanyak 2.542 lembar dengan capaian 60%, namun diperkirakan sampai dengan Triwulan IV akan terealisasi sebanyak 5053 lembar materai terpakai. Permasalahan ini terjadi dikarenakan banyaknya dokumen yang menggunakan materai serta banyaknya dokumen yang salah atau memerlukan revisi sehingga materai yang lama tidak dapat dipergunakan kembali pada dokumen hasil revisi.
4. Laporan penyediaan Jasa pemeliharaan kendaraan dinas merupakan pembayaran Pajak kendaraan berplat merah. Sampai dengan Triwulan III 2024 baru terealisasi sebanyak 9 unit yang telah dibayarkan pajaknya. Semula ditargetkan sebanyak 84 unit kendaraan dinas yang dipelihara termasuk biaya servis terhadapnya. Berdasarkan hasil dilapangan bahwa begitu sulitnya menentukan banyaknya unit kendaraan dinas yang mengalami perbaikan baik berat maupun ringan sehingga perbaikan



- dibuat dalam bentuk paket saja. Oleh karena itu perhitungan hanya sebatas untuk pembayaran pajak kendaraan dinas.
5. Pelaksanaan medical Check Up Kepala dan Wakil Kepala Daerah sampai dengan triwulan III belum melakukan pemeriksaan terhadap kesehatan. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan bahwa para pemimpin tersebut begitu banyak kegiatan sehingga tidak memiliki waktu untuk melakukan medical check up. Kepala Bagian umum akan tetap berusaha mengingatkan kembali kepada para pimpinan betapa pentingnya menjaga kesehatan walau dalam keadaan sesibuk apa pun.
 6. Pada Bagian Organisasi banyak melakukan revisi terhadap sasaran untuk indikator pada level staf. Selama berjalannya waktu ketika Bagian organisasi melakukan penilaian terhadap Kematangan Organisasi banyak nilai kematangan yang begitu sangat rendah. Kematangan menilai unsur kelengkapan administrasi pada setiap OPD. Bahkan hampir setiap tahun tidak mengalami kenaikan yang begitu signifikan. Sehingga sasaran yang akan dilakukan bukan hanya menghitung jumlah kematangan melainkan melakukan pendampingan terhadap seluruh OPD dengan nilai rendah. Hal ini juga dilakukan terhadap Anjab, Pelayanan Publik, pelaksanaan RB dan SAKIP yang juga dilakukan pendampingan.
 7. Penyusunan Produk Hukum. Pada awal penyusunan menargetkan hanya 1 dokumen saja, namun setelah mendapatkan penilaian maka dilakukan revisi terhadap target yang begitu sangat rendah menjadi 800 produk hukum yang akan disusun dalam setahun untuk seluruh Kabupaten Kapuas Hulu. Perangkat Daerah Lambat dalam menyiapkan Rancangan Produk hukum yang akan disusun. Setiap Rancangan produk hukum yang diusulkan oleh Perangkat Daerah, sebaiknya sudah dilengkapi dengan dokumen awal penyusunan produk hukum yang akan diharmonisasikan.
 8. Penyusunan Dokumen RENSTRA yang tidak tepat sasaran. Dokumen renstra memiliki hanya 3 IKU yang Sebagian tidak mengakomodir seluruh Program yang menjadi tupoksi Asisten. Beberapa indikator dan sasaran sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini dengan target yang begitu



rendah sehingga antara capaian kinerja tahunan dan target akhir renstra sudah melebihi target diatas 130%.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2023 berada pada tahap jangka menengah yang ke-empat yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan visi TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG.

3.2 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah **“TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH DAN TERAMPIL”**. Visi tersebut mengandung lima elemen utama pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu yaitu Harmonis, Energik, Berdaya saing, Amanah, dan Terampil sebagaimana dijabarkan pada penjelasan di bawah ini:

1. **Harmonis:** mengandung makna dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara bertumpu kepada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur dengan mengedepankan nilai etika, moral dan norma dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, selaras dan serasi.



2. **Energik:** mengandung makna penuh semangat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diindikasikan dengan meningkatkannya pendapatan per kapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, peningkatan ekonomi serta keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
3. **Berdaya saing:** mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumberdaya manusia yang unggul, profesional, kompetitif, serta berwawasan ke depan.
4. **Amanah:** mengandung makna bahwa dalam tata kelola pemerintahan yang baik, mengandung unsur partisipatif, akuntabel, transparan dan responsibilitas, akuntabilitas, dan bersih, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
5. **Terampil:** mengandung makna kondisi dimana kualitas sumber daya manusia yang handal, kreatif, inovatif dan produktif dengan kompetensi yang teruji serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi.

Dalam rangka mewujudkan **Visi** tersebut maka telah ditetapkan berbagai **Misi** Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan;
2. Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi;
3. Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing;



4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas;
5. Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat.

Berdasarkan penjabaran Misi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu di atas, Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu memiliki keterkaitan tugas dan fungsi dengan misi **keempat** yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas**.

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan untuk pencapaian visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sebab itu, tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator kinerja.

Adapun tujuan strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah** dengan 2 indikatornya: Predikat SAKIP Sekretariat dan Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten;
- 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.** Dengan indikatornya: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah;

Untuk mencapai tujuan diatas harus ditentukan pula sasaran yang akan menunjang tercapainya tujuan tersebut. Sasaran merupakan perwujudan dari misi yang pencapaiannya diharapkan dalam kurun waktu satu tahunan dapat terlaksana. Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan 2 (dua) sasaran sebagai berikut:



Sasaran Pertama :

“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” dengan indikator sasaran adalah:

1. Predikat SAKIP Sekretariat Daerah;
2. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten;

Sasaran Kedua :

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”, dengan indikator sasaran adalah:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah.

Adapun Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2025 sesuai dengan tabel dibawah ini :

Tabel 6 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Predikat SAKIP Sekretariat Daerah	BB
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Predikat SAKIP Sekretariat Daerah	BB
			Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten	3,3
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	80,9
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	80,9



3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan 3 program dan 19 Kegiatan dengan 78 Sub Kegiatan.

Table 7 Program dan Kegiatan dan Target Capaian Kinerja Renja

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Targ et 2024	Satuan	2025		2026		Penanggu ng Jawab
							Target	Rp	Targ et	Rp	
RPJMD	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah			Nilai SAKIP	BB	Predika t	BB		A		RPJMD
Sekretariat Daerah											
Meningkatk an akuntabilita s kinerja Penyelengga ran Pemerintaha n Daerah				Predikat SAKIP Sekretariat Daerah	BB	Predika t	BB	68.212.609.698	A	68.212.609.698	Sekda
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah			Predikat SAKIP Sekretariat Daerah	BB	Predika t	BB	68.212.609.698	A	68.212.609.698	Sekda
				Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten	3,3	Nilai	3,3		3,3		
	Meningka tnya Kualitas Pelayanan Publik			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	80,9	Nilai	80,9		81		
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase kebijakan strategi di bidang administrasi umum yang ditindaklanjuti	100	%	100	47.239.010.076	100	47.239.010.076	Asistem Adum
	4.01.01.2 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, dokumen Penganggaran dan Laporan Kinerja yang sesuai dengan pedoman teknis	100	%	100	701.249.000	100	701.249.000	Perkeu
	4.01.01.2. 01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dok	4	474.692.000	4	474.692.000	
	4.01.01.2. 01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1	Dok	1	38.514.000	1	38.514.000	
	4.01.01.2. 01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1	Dok	1	31.717.000	1	31.717.000	
	4.01.01.2. 01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1	Dok	1	30.032.000	1	30.032.000	
	4.01.01.2. 01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1	Dok	1	17.444.000	1	17.444.000	
	4.01.01.2. 01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian ki nerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5	Lap	5	90.850.000	5	90.850.000	
	4.01.01.2. 01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	4	Lap	4	18.000.000	4	18.000.000	
	4.01.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100	%	100	16.972.139.981	100	16.972.139.981	
	4.01.01.2. 02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12	Bln	12	16.241.154.981	12	16.241.154.981	
	4.01.01.2. 02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1	Dok	1	263.430.000	1	263.430.000	



Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

		4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1	Dok	1	194.520.000	1	194.520.000	
		4.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	Dok	1	17.600.000	1	17.600.000	
		4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hail Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Lap	1	42.705.000	1	42.705.000	
		4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan tindaklanjut pemeriksaan	1	Dok	1	197.985.000	1	197.985.000	
		4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	4	Lap	4	7.600.000	4	7.600.000	
		4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dok	1	7.145.000	1	7.145.000	
		4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	95	%	95	521.811.000	95	521.811.000	
		4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dok	1	32.910.000	1	32.910.000	Umum
		4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dok	1	39.315.000	1	39.315.000	
		4.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	Lap	1	61.516.300	1	61.516.300	
		4.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Lap	1	36.981.000	1	36.981.000	
		4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Lap	1	351.088.700	1	351.088.700	
		4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	90	%	90	744.652.000	90	744.652.000	Umum
		4.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	36	Unit	36	120.400.000	36	120.400.000	
		4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	1	232.680.000	1	232.680.000	
		4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	120	Dokumen	120	108.460.000	120	108.460.000	
		4.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Siste	117	Dokumen	117	100.832.000	117	100.832.000	
		4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kine	117	Dokumen	117	17.150.000	117	17.150.000	
		4.01.01.2.05.0006									
		4.01.01.2.05.0008									
		4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40	Orang	40	165.130.000	40	165.130.000	
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum yang terpenuhi	100	%	100	9.716.656.250	100	9.716.656.250	Umum
		4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	88.212.000	1	88.212.000	
		4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	1	Paket	1	39.750.000	1	39.750.000	



Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	1	386.953.000	1	386.953.000	
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	199.681.000	1	199.681.000	
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1	179.279.500	1	179.279.500	
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30	Laporan	30	2.117.944.000	30	2.117.944.000	
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	1500	Laporan	1500	6.533.146.750	1500	6.533.146.750	
	4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	1	171.690.000	1	171.690.000	
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terakomodir	100	%	100	3.887.532.000	100	3.887.532.000	Umum
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	1	3.851.832.000	1	3.851.832.000	
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang tersedia	650	Unit	650	35.700.000	650	35.700.000	
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100	%	100	3.826.502.000	100	3.826.502.000	Umum
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5053	Laporan	5053	61.000.000	5053	61.000.000	
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	2.161.000.000	12	2.161.000.000	
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Laporan	6	925.565.000	6	925.565.000	
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	678.937.000	12	678.937.000	
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100	%	100	1.728.940.345	100	1.728.940.345	Umum
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34	Unit	34	566.789.345	34	566.789.345	
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11	Unit	11	686.901.000	11	686.901.000	
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	2	475.250.000	2	475.250.000	
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Keuangan dan Kesejahteraan Kepala Daerah	100	%	100	726.831.000	100	726.831.000	Umum
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12	Orang/Bulan	12	207.831.000	12	207.831.000	
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	7	Orang	7	119.000.000	7	119.000.000	
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Orang/Bulan	2	400.000.000	2	400.000.000	
4.01.01.2.13		Penataan Organisasi	Jumlah Perangkat Daerah dengan Tingkat Kematangan Tinggi melalui Penilaian Mandiri	15	OPD	15	750.027.000	15	750.027.000	Organisasi
			Jumlah Analisis Jabatan Perangkat Daerah yang tepat fungsi	6	Anjab	6		6		
			Jumlah Perangkat Daerah yang telah menetapkan Standar Pelayanan Publik	7	OPD	7		7		



Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025
Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

			Jumlah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Reformasi Birokrasi	6	OPD	6		6		
			Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai AKIPnya B sesuai Hasil Evaluasi Tim APIP dari Perangkat Daerah yang dievaluasi	18	OPD	18		18		
		4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah PD yang dilakukan pendampingan pengelolaan kelembagaan	22	PD	22	236.085.000	22	236.085.000
				Jumlah PD yang dilakukan pendampingan anjab	5	PD	5		5	
		4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah PD yang dilakukan Pendampingan Ketatalaksanaan	50	PD	50	238.442.000	50	238.442.000
				Jumlah Unit Pelayanan Publik yang dilakukan Pendampingan	7	PD	7		7	
		4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah PD yang dilakukan pendampingan SAKIP	50	PD	50	275.500.000	50	275.500.000
				Jumlah PD yang terlibat dalam Pelaksanaan RB sebagai Leading Sector	6	PD	6		6	
		4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah layanan Fasilitasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	200	Lyn	200	7.662.669.500	200	7.662.669.500
				Jumlah layanan komunikasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	230	Lyn	230		230	
				Jumlah layanan dokumentasi bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	200	Lyn	200		200	
		4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1	Lap	1	3.680.730.000	1	3.680.730.000
		4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1	Lap	1	961.350.500	1	961.350.500
		4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1	Lap	1	3.020.589.000	1	3.020.589.000
		4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan strategis dibidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100	%	100	18.465.299.822	100	18.465.299.822
		4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase penyelesaian administrasi batas wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Desa	77	%	77	642.441.500	77	642.441.500
				Persentase Pemuntakhiran Data Rupabumi Kecamatan	74	%	74		74	
				Persentase Jumlah OPD yang Menyusun LPPD sesuai petunjuk	90	%	90		90	
		4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintah	2	Dok	2	180.742.500	2	180.742.500
		4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1	Dok	1	138.997.000	1	138.997.000
		4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1	Dok	1	322.702.000	1	322.702.000
		4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase rumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan masyarakat, dan kesejahteraan Sosial yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	100	%	100	17.065.024.222	100	17.065.024.222
				Persentase Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan terkait Kesejahteraan Sosial yang terlaksana	100	%	100		100	



Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025
Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

		Persentase Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang terlaksana	100	%	100		100		
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	Dok	1	16.288.290.422	1	16.288.290.422	
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	131	Dok	131	487.206.800	131	487.206.800	
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, TrantibumLinmas	544	Dok	544	289.527.000	544	289.527.000	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase kebijakan yang harmonis	70	%	70	624.106.100	70	624.106.100	Hukum
		Persentase penyelesaian Proses penyusunan produk hukum	90	%	90		90		
		Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum	90	%	90		90		
		Persentase Publikasi dan penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan	90	%	90		90		
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	800	Dok	800	342.821.000	800	342.821.000	
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	10	Kasus	10	150.210.000	10	150.210.000	
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	19	Dok	19	131.075.100	19	131.075.100	
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Wajib Daerah	21	%	21	133.728.000	21	133.728.000	Pemerintahan
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	5	Dok	5	133.728.000	5	133.728.000	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan strategi dibidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	100	%	100	2.508.299.800	100	2.508.299.800	Asisten Ekbang
		Persentase kebijakan Pembangunan yang ditindaklanjuti	100	%	100		100		
		Persentase pemanfaatan kebijakan sumber daya alam yang tepat guna	100	%	100		100		
		Persentase kebijakan daerah di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang di tindaklanjuti	100	%	100		100		
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian yang di tindaklanjuti	100	%	100	346.885.300	100	346.885.300	Ekbang SDA
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4	Dok	4	112.955.000	4	112.955.000	
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4	Dok	4	77.537.000	4	77.537.000	
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan	1	Dok	1	52.131.000	1	52.131.000	



Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

	4.01.03.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1	dok	1	52.131.300	1	52.131.300	Ekbang SDA
	4.01.03.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	2	Dok	2	52.131.000	2	52.131.000	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase rekomendasi kebijakan Administrasi Pembangunan yang di tindaklanjuti	100	%	100	196.292.200	100	196.292.200	
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4	Dok	4	41.676.500	4	41.676.500	
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi ProgramPembangunan	4	Lap	4	47.081.700	4	47.081.700	
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan	100	Dok	100	107.534.000	100	107.534.000	PBJ
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase capaian efisiensi dan efektifitas pada pengadaan barang dan jasa dengan metode pemilihan tender/seleksi dan e-purchasing	80	%	80	1.812.996.000	80	1.812.996.000	
			Jumlah Penerima Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik	50	OPD	50		50		
			Jumlah pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personil Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPEJ)	20	Plk Ush	20		20		
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase capaian efisiensi dan efektifitas pada pengadaan barang dan jasa dengan metode pemilihan tender/seleksi dan e-purchasing	80	%	80	1.812.996.000	80	1.812.996.000	
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	78	Dok	78	377.389.100	78	377.389.100	
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	60	Org	60	227.338.100	60	227.338.100	
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase rekomendasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang di tindaklanjuti	100	%	100	152.126.300	100	152.126.300	Ekbang SDA
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4	%	4	52.131.300	4	52.131.300	
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	2	Dok	2	52.131.000	2	52.131.000	
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	2	Dok	2	47.864.000	2	47.864.000	
	TOTAL							68.212.609.698	68.212.609.698	-



BAB IV

PENUTUP

Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan kinerja OPD yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran, maka Sekretariat Daerah menyusun rancangan rencana kerja yang dituangkan dalam wujud dokumen Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025, yang berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran, yakni mulai awal tahun hingga akhir tahun 2025. Dokumen ini menjelaskan perihal prioritas pembangunan yang akan menjadi fokus program tahun 2025 beserta sasaran, arah kebijakan dan berbagai indikasi kegiatan untuk mencapainya.

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025 dan berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah tahun 2021-2026. Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan.

Selanjutnya Sekretaris Daerah selaku Kepala Sekretariat Daerah beserta segenap Kepala Bagian dan Staf akan melaksanakan program-program kegiatan sesuai dengan perencanaan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025. Dalam kaitan itu, diharapkan kepada Bupati selaku Kepala Daerah serta Wakil Bupati Kapuas Hulu dapat memberikan dukungan sepenuhnya agar program-program yang telah disusun dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran sebagaimana yang dicita-citakan.

Selain itu, perlu adanya sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju serta disiplin dari semua pihak sehingga pada akhirnya nanti terwujud pelaksanaan program-program kegiatan yang sepenuhnya mampu



memberikan manfaat dalam rangka mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 untuk kesejahteraan masyarakat Kapuas Hulu yang adil dan merata.

Putussibau, Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,



Drs. H. MOHD. ZAINI, M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 19650910 199303 1 011



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Daftar Dokumen SAKIP Sekretariat Daerah

No	Dokumen	Link Soft Copy (PDF)	Hard Copy	Ket.
1	Matrik RATL hasil Evaluasi SAKIP	Link	-	
2	Pohon Kinerja	-	-	
	Cascading Kinerja	Link	-	
	Crosscutting	Link	-	
3	SOP Pengukuran Kinerja	Link	-	
	SOP Pengumpulan Data Kinerja		-	
4	Renstra Revisi 2021-26	Link	-	
5	Renja 2024	Link	-	
6	Renja 2025	Link		
7	Perjanjian Kinerja 2024	Link	-	
8	SKP 2024		-	
9	Rencana Aksi	Link	-	
	Rencana Aksi Perubahan		-	
10	RKA 2024	-	-	
	DPA 2024	-	-	
11	DPPA Penyempurnaan 2024	Link	-	
	DPPA 2024	Link	-	
12	IKU	Link	-	
	IKI	Link	-	
13	LRA 2024		-	
14	Laporan Kinerja 2024	-	-	
15	Surat Pengantar LAKIP 2024		-	
16	Monitoring Kinerja	Link	-	
	Evaluasi Kinerja Triwulan I		-	
	Evaluasi Kinerja Triwulan II	-	-	
	Evaluasi Kinerja Triwulan III		-	
	Evaluasi Kinerja Triwulan IV	-	-	
	Publikasi:	Link	-	
17	- Renstra	Link	-	PPID
	- Renja 2024	-	-	PPID
	- PK	-	-	PPID
	- LAKIP 2024	-	-	PPID
18	Penilaian AKIP 2023	Link	-	
19	Penilaian Mandiri AKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	Link	-	

Sumber: <https://bit.ly/Daftar-Dok-SAKIP-SETDA>